KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA (KUPA-SB) TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 900.1.1/1198//BPKAD
900.1.1/161/DPRD
TANGGAL : 25 Juli 2025
TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA (KUPA-SB) TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 900.1.1/1198/BPKAD
900.1.1/161/ DPRD

TANGGAL : 25 Juli 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Parwata, SE
   Jabatan : Bupati Karangasem
   Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
      Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

   b. Nama : Kadek Weisya Kusmiadewi, SH., M.Kn
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
      Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

   c. Nama : I Gusti Agung Dwi Putra, ST
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
      Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

   d. Nama : I Wayan Suparta, SE
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
      Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana dan Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) Tahun Anggaran 2025.

Amlapura, 25 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM
Selaku
PIHAK PERTAMA

I Gusti Putu Parwata, SE

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM
Selaku,
PIHAK KEDUA

I Wayan Suastika, ST
KETUA

Kadek Weisya Kusmiadewi, SH., M.Kn
WAKIL KETUA

I Gusti Agung Dwi Putra, ST
WAKIL KETUA

I Wayan Suparta, SE
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang Penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA. 3

1.3 Dasar hukum penyusunan Perubahan KUPA..... 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. .....

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 6

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024. 15

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025. 24

2.1.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025..... 25

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah. 28

2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan. 35

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... 42

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... 43

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah
yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025..... 45

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah. 49

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. .....

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja. 52

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer. 57

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH. .....

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan. 60

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan..... 60

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN. **62**

BAB VIII PENUTUP. **65**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 7

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024... 16

Tabel 2.3 PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan, Konstan Tahun 2020-2024 (juta rupiah). 19

Tabel 2.4 Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020-2024. 20

Tabel 2.5 IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024. 24

Tabel 2.6 Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Perubahan)..... 26

Tabel 2.7 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 35

Tabel 3.1 Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Perubahan) 44

Tabel 4.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Perubahan) 47

Tabel 5.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Perubahan) 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) Tahun 2024	17
Gambar 2.2	Lapangan Usaha Dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah Tahun 2024	18
Gambar 2.3	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2019-2024	22
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 162 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyusun KUPA sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) dan Perubahan APBD yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja selama satu semester tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD yang dijadikan dasar dalam menyusun rancangan KUPA, PPPAS, dan Perubahan APBD.

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dalam Rangka Memastikan Kesesuaian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna mensinergikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, ke dalam Perubahan KUA, perlu dilakukan percepatan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan dinamika perkembangan capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, bahwa terjadinya Perubahan KUA dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Penyusunan KUPA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Perubahan RKPD SB). Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar sebagai berikut:

a. adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan Khususnya dana transfer dan pendapatan asli daerah, serta adanya perubahan kebijakan dibidang belanja daerah.
b. adanya pergeseran antar organisasi, unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja.
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
d. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan.

Kebijakan dibidang pendapatan, dan belanja daerah disusun dan dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, dengan berlalunya pandemi *Covid-19* di Indonesia, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pariwisata Bali, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Namun disisi lain perang dagang antara Amerika dan Cina serta dengan ketegangan geopolitik antara Rusia, Ukraina dan bagian timur tengah juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan. Dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 1 (satu) kali, yang mana disebabkan oleh penyesuaian terkait dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

SiLPA tahun sebelumnya wajib dimanfaatkan dan digunakan kembali untuk menutup defisit anggaran. Sudah barang tentu perubahan-perubahan dimaksud ditindak lanjuti dan disesuaikan ke dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didahului melalui penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Sementa Berencana (KUPA-SB) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025.
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Selain itu bahwa penyusunan KUPA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP), yang nantinya KUPA dan Perubahan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana (KUPA-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Disisi lain kebijakan ekonomi pembangunan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pegembangan pariwisata khususnya pengembangan desa wisata berbasis lingkungan dan potensi unggulan, dan perkuatan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis. Harapannya melalui pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Disamping itu, kemudahan proses perijinan berusaha, keamanan daerah dan sarana prasarana insfrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem. Beberapa kebijakan pemerintah pusat, secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian di daerah, diantaranya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, hal ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten
2	Meningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
3	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan	Pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan melalui kedaulatan beras
4	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Karangasem	Optimalisasi peran TPID
5	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas dan pertanian organik serta peternakan dan perikanan.	Pemetaan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah, dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem
6	Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	Pemetaan dan pengembangkan potensi industri pengrajin arak

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
7	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Kabupaten Karangasem	Program revitalisasi subak lestari/subak abadi
8	Membangun sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan karangasem
9	Membangun sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
10	Memberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-hasil pertanian
11	Mengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan khususnya rumah sakit	Pelayanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
		Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien
		Pembangunan rumah sakit
12	Pemenuhan SPM Kesehatan	revitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi poskesdes dan polindes/Pustu di masing-maisng desa
		Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengadaan dokter spesialis kandungan dan anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di puskesmas rawat inap
		Pembangunan puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali
		Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD
13	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Karangasem untuk mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan kepesertaan Krama Karangasem dalam UHC/JKN KIS
14	Pemenuhan SPM pendidikan dan perluasan serta pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah	Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK dan sekolah dasar yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
		Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
15	Pengembangan kapasitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Sinergi penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun
16	Mendorong keterlibatan desa adat serta berkordinasi dengan Kementeriaan Agama dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui kegiatan-kegiatan pasraman baik di sekolah maupun di desa adat yang berkolaborasi dengan program-program Provinsi Bali	Pengembangan PAUD/TK berbahasa bali, pendidikan PAUD/TK hindu
		Pengembangan pasraman di sekolah maupun di desa adat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
17	Menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan perkembangan industri dan teknologi.	Mengembangkan pendidikan tinggi akademi komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem
18	Pemberdayaan keluarga dalam menciptakan karakter generasi muda yang berkualitas	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
19	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
		Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
		Sertifikasi tenaga kerja
20	Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri , kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten	Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (desa adat)
		Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
		Memfasilitasi pedagang UKM yang berciri khas karangasem
21	Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenaga kerjaan	Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan
22	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi	Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penyandang masalah kesejahteraan sosial	
		Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
23	Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat serta dunia usaha dalam membantu RTLH bagi Krama Karangasem	Pemberian bantuan untuk membangun/ merehab RTLH terutama bagi masyarakat miskin berbasis data base
24	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni bagi Krama Karangasem	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
25	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
		Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya Krama Karangasem
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
27	Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya	Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (sanggar, yayasan, sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
		Memberdayakan pelaku seni untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa adat
28	Memberdayakan desa adat dalam upaya pelestarian dan pembinaan seni, budaya dan kearifan lokal	Desa adat selaku lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan non formal berbasis agama hindu, memberikan pembinaan seni budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda/ teruna teruni
29	Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari-hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih	Fasilitasi sarana prasarana keagamaan dan peribadatan serta memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan para Sulinggih dan Pemangku
		Pembangunan insfrastruktur untuk mendukung penyediaan air melalui perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber lain
30	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
		Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum adat/awig/perarem di desa adat
31	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak	Revitalisasi subak melalui Penguatan lembaga dan SDM pengelola subak serta memberikan bantuan sarana prasarana dan dukungan anggaran
32	Mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru	Pembangunan / pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata diwilayah potensi wisata.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
33	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mengembangkan dan mengoptimalkan serta menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
34	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Karangasem dengan brand bali di pasar lokal dan ekspor	Pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman
		Mengembangkan ekonomi kreatif/industri kreatif
35	Memperkuat koperasi dan lembaga perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
36	Pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Karangasem	Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
37	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Karangasem	Penguatan regulasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
38	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman, ekonomi hijau dan rendah karbon	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
39	Pemberdayaam masyarakat sebagai subyek dan obyek pariwisata	Pengembangan destinasi wisata baru (wisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang menjadi wisata alternatif
		Membangun kawasan wisata terpadu

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourisme / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan).
40	Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif
41	Mengadakan event pariwisata yang terintegrasi dengan sektor petanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya	Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
		Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
42	Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem	Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
43	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	
44	Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	Pendidikan politik kepada masyarakat
45	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
		Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan
		Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
46	Pengembangan sumber pendapatan lain-lain	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam pengawasan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Karangasem meningkat dari 11,18 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,66 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Karangasem mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,33 persen, meningkat 1,23 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang ebesar 3,10 persen.

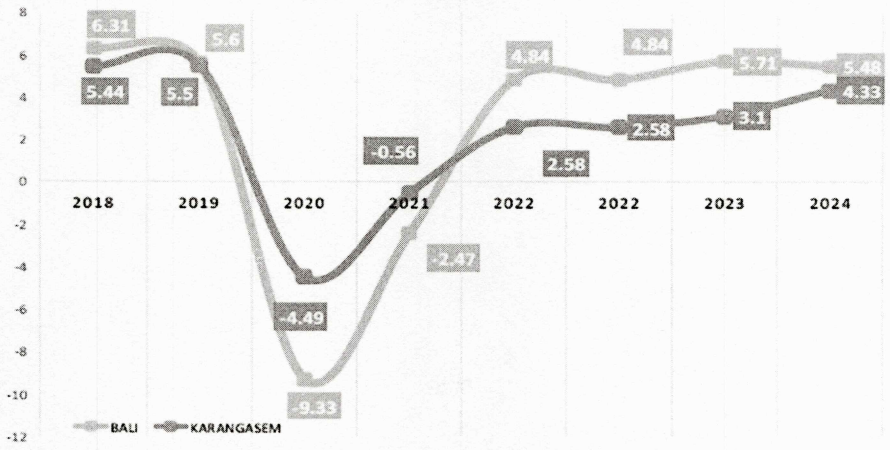
Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur ekonomi Kabupaten Karangasem didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Kategori lapangan usaha, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan dana Akomodasi dan Makan Minum, Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Kategori Konstruksi, dapat dilihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.1 berikut ini

Tabel 2.2
laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) tahun 2020-2024

Katagori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,17	2,86	-0,52	-1,15	1,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,31	6,45	7,12	5,82	5,09
C	Industri Pengolahan	-2,40	0,29	3,89	0,89	1,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,65	-2,53	9,73	10,71	1,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,07	-1,45	1,10	5,60	5,27
F	Konstruksi	-3,14	5,64	3,13	2,04	5,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,13	-0,68	5,43	3,62	0,49
H	Transportasi dan Pergudangan	-9,02	-8,54	4,07	5,18	3,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	-29,55	-10,29	10,66	14,85	9,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,20	4,36	0,12	1,66	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,37	-3,21	9,85	15,79	11,89
L	Real Estate	0,52	1,8	1,08	1,62	3,73
M	Jasa Perusahaan	-3,04	-2,18	6,34	3,34	7,46
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,13	-3,79	-2,92	6,97
O	Jasa Pendidikan	-0,49	1,59	0,48	0,11	5,35
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78	4,66	1,37	2,60	4,66
Q	Jasa Lainnya	-5,42	-3,48	9,89	8,38	3,52
Produk Domestik Regional Bruto		-4,45	-0,56	2,58	3,10	4,33

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

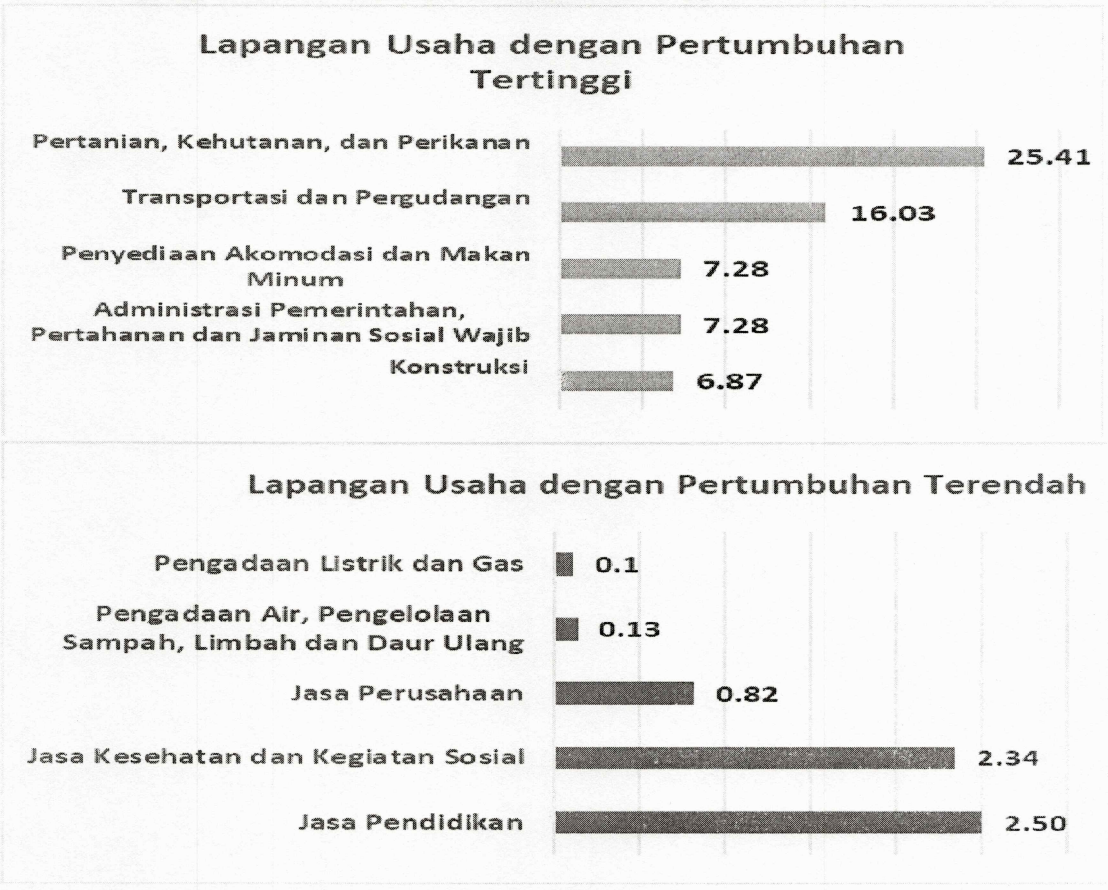
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur ekonomi Kabupaten Karangasem didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Kategori Konstruksi.

Kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 dihasilkan oleh Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,41 persen (menurun dari 25,76 persen pada tahun 2023). Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,03 persen (menurun dari 16,18 persen pada tahun 2023). Selanjutnya Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu mencapai 9,72 persen (meningkat dari 9,17 persen pada tahun 2023), Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,28 persen (meningkat dari 7,20 persen pada tahun 2023), Kategori Konstruksi mencapai 6,87 persen (menurun dari 6,95 persen pada tahun 2023), berikut ini adalah lima

kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2024 seperti pada gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2024



Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan

di suatu daerah atau wilayah Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahterahan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PBRD per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahterahaan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 sebesar 37,95 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 3,39 persen. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	16.452.845	16.487.625	17.669.491	18.974.860	20.210.330
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	10.635.789	10.570.603	10.843.410	11.179.220	11.663.310
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	492,40	494,90	497,50	500,00	502,00
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	39,31	32,92	34,56	37,95	40,23

3. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- GR $\leq$ 0,20 □kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- 0,20 < GR $\leq$ 0,39 □ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- 0,39 < GR $\leq$ 0,59 □ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- 0,59 < GR $\leq$ 0,79 □ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- GR > 0,79 □ kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2024 sebesar 0,2830. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan Provinsi Bali 0,3611. Untuk Kabupaten/Kota, Indek Gini Rasio paling tinggi adalah Kota Denpasar (0,3413) dan paling kecil adalah Kabupaten Badung (0, 2808). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,2884
Kab. Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,3007
Kab. Badung	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808
Kab. Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,2860
Kab. Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,3071
Kab. Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021
Kab. Karangasem	0,3269	0,3180	0,2970	0,3370	0,2830
Kab. Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,2785
Kota Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,3413
Provinsi Bali	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620	0,3611

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

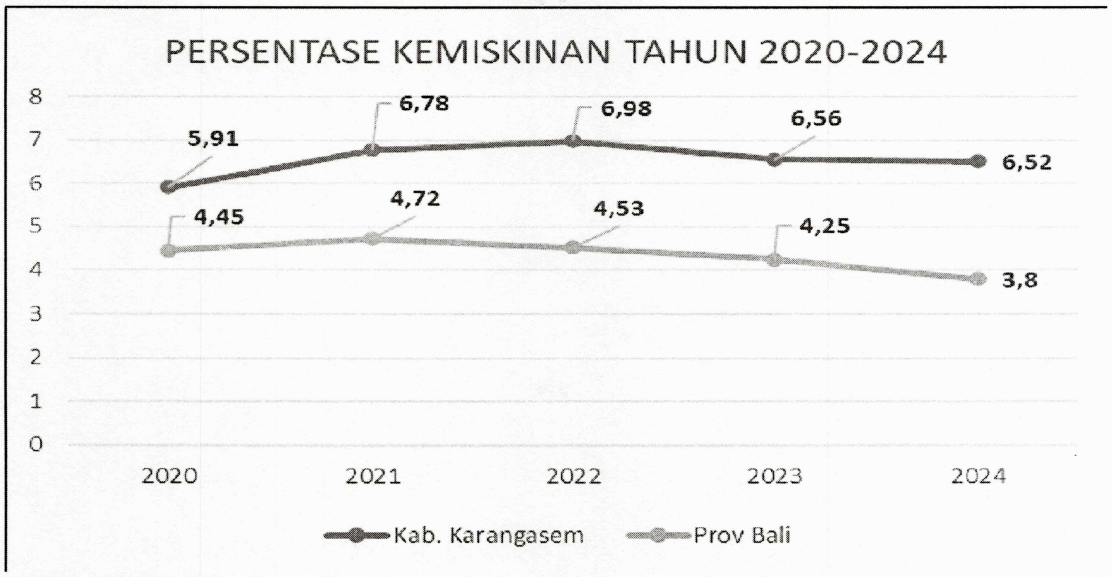
4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami *pluktuatif.* Dari tahun 2019 sebesar 6,55% sampai dengan tahun 2020 mengalami mengalami penurunan menjadi 5,91%. Meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,78% dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 6,98% sebagai akibat pandemi *Covid*-19 dan tahun 2023 berangsur-angsur mengalami penurunan menjadi 6,56% serta pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,52 %. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karangasem setiap tahunnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Bali. Secara detail Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada gambar 2.3

Gambar 2.3
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Karangasem Dan Bali
Tahun 2019-2024



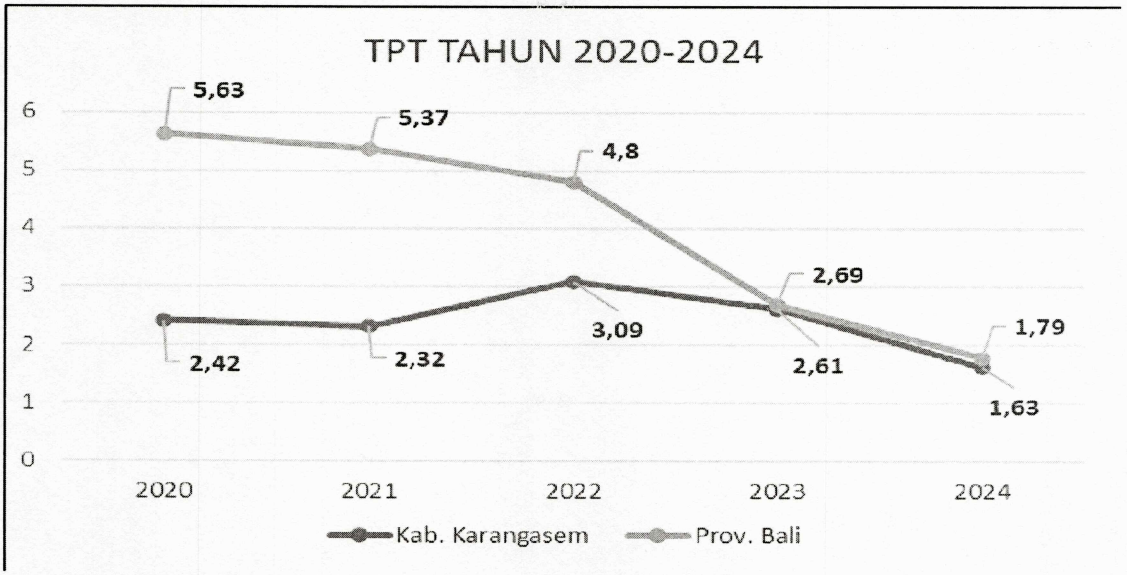
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2025

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karangasem berpluktuaktif. Tahun 2020 sebesar 2,42%, tahun 2021 menuurun menjadi 2,32% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,09%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,61% dan tahun 2024 menurun menjadi 1,63. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Perkembangan Tahun 2024 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali sebesar 1,79. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023, dan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem disajikan Gambar 2.4 berikut :

Gambar 2.4

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

6. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) diukur dari tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2020 -2024 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Karangasem	67,35	67,36	68,28	70,09	70,91
Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	77,10	78,63
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	0,01	0,01	0,92	1,81	0,82

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2024

Dari Tabel 2.5 terlihat bahwa IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2024 IPM Kabupaten Karangasem tumbuh 0,82 persen, IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2024 mencapai angka 70,91 berada pada kategori tinggi. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali, IPM Kabupaten Karangasem jauh lebih rendah, begitu pula jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali, IPM Kabupaten Karangasem menduduki posisi terendah.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mulai mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,33%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang yang tumbuh sebesar 3,10%. Hal ini menggambarkan aktivitas perekonomian sudah berangsur-angsur mengalami pemulihan walaupun belum bisa mencapai pada situasi normal sebelum *Covid-19.*

Namun jika dilihat dari sisi lapangan usaha yang mempunyai kontribusi paling tinggi terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,80 persen yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sedikit melambat. Hal ini merupakan tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2025 sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan nilai tambah dan daya ungkit pada sektor pertanian melalui peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Situasi perekonomian global yang tidak menentu sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai menyebabkan inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
b. Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
c. Perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan sering terjadi bencana baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor termasuk bencana pertanian seperti gagal panen yang menyebabkan kerugian petani, belum lagi maraknya wabah penyakit ternak.
d. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dikarenakan keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi dalam bidang pertanian.
e. Hilirisasi hasil produksi pertanian dan pemberdayaan UMKM optimal.

2.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diperkirakan tetap optimis seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara, diperkirakan akan menopang pemulihan sektor pariwisata sepanjang tahun 2025. Selain itu, perhelatan *event* berskala nasional dan internasional diperkirakan mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali, hal ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem.

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan APBN, diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan insfrastruktur pendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang diupayakan dilaksanakan melalui kegiatan padat karya. Selain itu dengan membuka kembali sektor-sektor perekonomian, penyediaan anggaran stimulus untuk UMKM, serta penguatan ketahanan pangan masayarakat melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.6

Tabel 2.6
Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025
(Perubahan)

No.	URAIAN	KUA 2025	Target RPJMD Tahun 2025	Target Perubahan KUA 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,3% - 4,7%	3,78%	4,4%-4,7%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,13%-2,35%	1,28%	1,63%-2,13%.
3	Tingkat Kemiskinan	5,95%-5,51%	4,61%	6,12%-5,90%
4	IPM	70,54-71,50	70,84	70,95-71,50
5	Gini Ratio	0,321 - 0,327	0,3059	0,283– 0,282

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 (data diolah)

a. Laju Pertumbuhan PDRB

Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Akselarasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya kegiatan strategis berada di Kabupaten Karangasem seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pusat Kebudayaan Bali dan beberapa kegiatan lainnya, hal ini akan memberi dampak tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem. Pada triwulan I 2025 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang mengalami perbaikan, begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 4,4%-4,7%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Karangasem diharapkan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ekonomi dan investasi yang berorientasi pada terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja guna menekan Tingkat

Pengangguran Terbuka. Dampak pandemi *Covid* 19 yang terjadi 2 tahun kemarin terhadap dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri, secara umum mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Seiring dengan berlalunya *Covid*-19 dan membaiknya aktivitas pariwisata sebagai sektor dengan penyerapan tenaga kerja maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,63%-2,13%.

c. Gini Ratio

Adanya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan ekonomi, melalui program pemerintah pusat dimana alokasi dana desa dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan pada tahun 2025 pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indek gini ditargetkan 0,283– 0,282.

d. Kemiskinan (%)

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2023 sebesar 6,56%. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan berlalunya *Covid-19*, beberapa sektor ekonomi mulai membaik, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini akan menyerap tenaga kerja yang pernah dirumahkan semasa *Covid-19*. Berbagi upaya telah dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Diharapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan ini bisa membantu dan memfasilitasi upaya-upaya yang menyangkut penanggulangan kemiskinan, melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan diharapkan data kemiskinan dapat diupdate setiap tahun dan program pengentasan yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Laju peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga angka kemiskinan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,12%-5,90%.

e. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Untuk meningkatkan angka IPM dibutuhkan waktu yang panjang, karena capaian program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, belum tentu langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan angka IPM. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem pada Perubahan tahun 2025 ditargetkan 70,95-71,50.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem pada Perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mencangkup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keungan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pengembalian sisa belanja hibah pilkada.

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Perhitungan pendapatan asli daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 direncanakan dengan memperhatikan :

a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.

b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.

c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.

d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II, proyeksi pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,40 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperkirakan meningkat sebesar 32,79% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar (95,38%) dan sementara Retribusi Daerah diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 1.473,96% diakibatkan pendapatan dari BLUD pindah ke Retribusi Daerah.

2) **Pendapatan Transfer**

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUA Semesta Berencana Tahun anggaran 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perhitungan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, dan pendapatan pengembalian sisa belanja hibah pilkada.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efesiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tangung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan acress gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagihasilkan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanianan dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih. Pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun 2025 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverge* (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2025.

4. Meningkatkan alokasi belanja modal khsusunya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, disamping juga belanja modal diarahkan untuk pengadaan aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.

5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.

7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, maka dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2026.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar

dibandingkan dengan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana dari selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) berdasarkan atas nilai Silpa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal tahun 2025 diarahkan untuk : PT. BPD Bali, dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2025 secara rinci disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.717.980.604.576**	**1.785.189.868.738**	**67.209.264.162**	**3,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**456.289.832.412**	**491.362.674.756**	**35.072.842.344**	7,69
4.1.01	Pajak Daerah	324.810.293.132	342.359.241.433	17.548.948.301	5,40
4.1.02	Retribusi Daerah	8.255.832.200	129.943.268.695	121.687.436.495	1474
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.424.995.605	13.843.338.532	3.418.342.927	32,79
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	112.798.711.475	5.216.826.096	-107.581.885.379	-95,38
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.259.717.455.744**	**1.281.370.568.606**	**21.653.112.862**	**1,72**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.113.362.000	1.148.833.102.000	-21.280.260.000	-1,82-
1.	Dana Desa	83.992.155.000	83.992.155.000	-	-
2.	Dana Insentif Fiskal	21.500.426.000	21.457.852.000	-42.574.000	-0,20
3.	Dana Taransfer Umum :	831.640.534.000	810.100.748.000	-21.539.786.000	**-2,59**
a.	*Dana Bagi Hasil*	*21.759.626.000*	*21.759.626.000*	-	-
b.	*Dana Alokasi Umum*	*809.880.908.000*	*788.341.122.000*	*-21.539.786.000*	*-2,66-*
4.	Dana Taransfer Khusus :	232.980.247.000	233.282.347.000	302.100.000	0,13
a.	*1) DAK Fisik*	*1.124.124.000*	*1.124.124.000*	-	-
b.	*2) DAK Non Fisik*	*231.856.123.000*	*232.158.223.000*	*302.100.000*	*0,13*
4.2.02	**Pendapata Transfer Antar Daerah**	**89.604.093.744**	**132.537.466.606**	**42.933.372.862**	**47,91**
1.	Pendapatan Bagi Hasil	64.204.483.370	107.137.856.232	42.933.372.862	66,87
2.	Bantuan Keuangan	25.399.610.374	25.399.610.374	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.973.316.420**	**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**1.973.316.420**	**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**
1.	Hibah	-	-	-	-
2.	Dana Darurat	-	-	-	-
3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.973.316.420	12.456.625.376	10.483.308.956	531,25
5	**BELANJA DAERAH**	**1.803.429.121.925**	**1.927.276.337.467**	**123.847.215.542**	**6,87**
5.1	Belanja Operasi	1.490.412.292.958	1.558.510.499.059	68.098.206.101	4,57
5.2	Belanja Modal	74.431.281.049	127.951.107.295	53.519.826.246	71,91
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00
5.4	Belanja Transfer	236.085.547.918	238.314.731.113	2.229.183.195	0,94
	Surplus/(Defisit)	**(85.448.517.349)**	**(142.086.468.729)**	**(56.637.951.380)**	**66,28**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**89.448.517.349**	**146.086.468.729**	**56.637.951.380**	**63,32**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	89.448.517.349	146.086.468.729	56.637.951.380	63,32
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**-**	**-**
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	**85.448.517.34**			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Dari Tabel 2.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam perubahan tahun anggaran 2025 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.785.189.868.738,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.209.264.162,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.717.980.604.576,00. Adapun komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 491.362.674.756,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 35.072.842.344,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 456.289.832.412,00. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
   a) Pajak Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 342.359.241.433,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.548.948.301,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 324.810.293.132,00.
   b) Retribusi Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 129.943.268.695,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.687.436.495,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 8.255.832.200,00.
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 13.843.338.532,00 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 3.418.342.927,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 10.424.995.605,00.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.216.826.096,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 107.581.885.379,00) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 112.798.711.475,00.

2. Pendapatan Transfer, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.281.370.568.606,00 meningkat sebesar Rp. 21.653.112.862,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.259.717.455.744,00. Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan Rincian sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Transfer Pusat dalam perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.148.833.102.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.21.280.260.000) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.170.113.362.000,00. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari :

a) Dana Perimbangan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.043.383.095.000,00, mengalami penurunan sebesar (Rp.21.237.686.000,00) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.064.620.781.000,00. Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp. 21.759.626.000,00

2) Dana Alokasi Umum (DAU), dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 788.341.122.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 21.539.786.000,00) dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 809.880.908.000,00.

3) Dana Transfer Khusus, (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 233.282.347.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 302.100.000,00 dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 232.980.247.000,00.

b) Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 21.457.852.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 42.574.000,00) dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 21.500.426.000,00.

c) Dana Desa, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 83.992.155.000,00.

2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dalam perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 107.137.856.232,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.933.372.862,00 dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 89.604.093.744,00. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 107.137.856.232,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.900.372.862,00 atau naik 66,87% dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 64.204.483.370,00.

b) Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 25.399.610.374,00 tetap sama dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 25.399.610.374,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 12.456.625.376,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.483.308.956,00 dibandingkan dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 1.973.316.420,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pendapatan pengembalian belanja hibah pilkada tahun 2024.

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.927.276.337.467,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.847.215.542,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.803.429.121.925,00. Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.558.510.499.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.098.206.101,00

(6,87%) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.490.412.292.958,00. Belanja Operasi terdiri :

1) Belanja Pegawai

   Belanja pegawai dalam Perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.942.141.326.815,00, mengalami penurunan sebesar (Rp. 11.111.367.505,00) dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 953.252.694.320,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 521.223.334.944,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.991.237.306,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 468.232.097.638,00.

3) Belanja Hibah

   Belanja hibah dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 91.965.837.300,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.788.336.300,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 62.177.501.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial

   Belanja bantuan sosial dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.180.000.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.570.000.000,00) dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.750.000.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 127.951.107.295,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 53.519.826.246,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 74.431.281.049,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 tetap sama dengan induk tahun anggaran 2025.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 238.314.731.113,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.229.183.195,00 dari

induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 236.085.547.918,00. Belanja Transfer terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 48.220.252.738,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.921.656.445,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 43.298.596.293,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

   Belanja bantuan keuangan dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 190.094.478.375,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 2.692.473.250,00) dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 192.786.951.625,00,

2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah daerah merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi dari Pengeluaran pembiayaan. Selisih tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga antara pendapatan dan belanja terjadi keseimbangan. Rincian pembiayaan daerah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditetapkan berdasarkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang diperhitungkan dalam perubahan tahun anggaran 2025. Penerimaan pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 146.086.468.729,00 meningkat sebesar Rp. 56.637.951.380,00 dari rencana induk tahun 2025 sebesar Rp. 89.448.517.349,00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunanan rancangan APBN. Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 15.300-15.900, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9-7,2%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2025 yaitu tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0%, kemiskinan 7,0-8,0% gini rasio 0,379-0,382, dan indeks modal manusia 0,56.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menurunkan batas bawah kisaran target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1% sampai 5,5% namun disesuaikan menjadi 4,7% sampai 5,0%. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengikuti revisi dari lembaga global seperti World Bank, IMF, dan OECD yang menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dan memperhatikan kondisi ekonomi global.

Inflasi diproyeksikan sebesar ±1,5-3,5%, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 15.300 – 15.900 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,9 – 7,2. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 85 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 580 – 605 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Optimalisasi pendapatan negara melalui UU HPP menjadi bagian penting dari reformasi struktural sektor fiskal. Hal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga

menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 10,12 – 10,14% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2025 menjadi 10,09 – 10,29% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat, adil efisien, dan berkelanjutan akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 7,0 – 8,0%, dan rasio gini: 0,379 – 0,382, tingkat pengangguran terbuka: 4,5 – 5,0%, Indeks Modal Manusia (IMM): 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP): 115 – 120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105 – 108.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 ditandai dengan berlalunya wabah *Covid*-19 pada tahun 2025, memberi angin segar bagi pembangunan daerah, hal ini mulai terlihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun disisi lain terjadinya peningkatan geo politik antara Rusia, Ukraina dan kawasan timur tengah secara tidak langsung memberikan dampak global terhadap ketersedian pangan dan energi global, hal ini perlu juga diwaspadai terkait peningkatan harga yang di indikasikan peningkatan inflasi. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap KUA Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mulai mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,33%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang yang tumbuh sebesar 3,10%. Hal ini menggambarkan aktivitas perekonomian sudah berangsur-angsur mengalami pemulihan walaupun belum bisa mencapai pada situasi normal sebelum Covid-19. Pemulihan aktivitas pariwisata yang diwujudkan melalui sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali di tahun 2025.

Pada triwulan II 2025 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama.

Sesuai dengan rilis Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0% – 5,8% (yoy) lebih tinggi dari pada proyeksi nasional yakni 4,7-5,5 % sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 4,4%-4,7%

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka dilakukan penyesuaian target makro ekonomi tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025
(Perubahan)

No	Makro Ekonomi Daerah	Target RPJMD Tahun 2025	Target KUA Tahun Anggaran 2025	Target Perubahan KUA Tahun Anggaran2025
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	3,78%	4,3%-4,7%	4,4%-4,7%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,28%	2,13%-2,35%	1,63%-2,13%.
3	Gini Ratio	0,3059	0,321-0,327	0,283– 0,282
4	Kemiskinan (%)	4,61%	5,95%-5,51%	6,12%-5,90%
5	IPM (%)	70,84	70,54-71,50	70,95-71,50

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa Pendapatan Hibah BOS.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Perhitungan pendapatan asli daerah dalam Rancangan Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 direncanakan dengan memperhatikan :

   a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.

   b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.

   c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.

d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II proyeksi pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,40 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperkirakan meningkat sebesar 32,79 % dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan menurun sebesar (95,38%), sementara Retribusi Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1.474% yang diakibatkan oleh pendapatan BLUD yang sebelumnya pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah digeser menjadi Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 masih berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Kedaerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan terdiri dari :

1). Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2025.

2). Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran 2025.

b. Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian

kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, dan sumber peningkatan dari pendapatan pengembalian sisa belanja hibah pilkada.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2025 secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.717.980.604.576**	**1.785.189.868.738**	**67.209.264.162**	**3,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**456.289.832.412**	**491.362.674.756**	**35.072.842.344**	7,69
4.1.01	Pajak Daerah	324.810.293.132	342.359.241.433	17.548.948.301	5,40
4.1.02	Retribusi Daerah	8.255.832.200	129.943.268.695	121.687.436.495	1474
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.424.995.605	13.843.338.532	3.418.342.927	32,79

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	112.798.711.475	5.216.826.096	-107.581.885.379	-95,38
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.259.717.455.744**	**1.281.370.568.606**	**21.653.112.862**	**1,72**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.170.113.362.000**	1.148.833.102.000	-21.280.260.000	-1,82-
1)	***Dana Perimbangan***	**1.064.620.781.000**	***1.043.080.995.000***	**21.237.686.000**	**-1,99**
a.	**Dana Taransfer Umum :**	**831.640.534.000**	810.100.748.000	-21.539.786.000	**-2,59**
	1) Dana Bagi Hasil	21.759.626.000	*21.759.626.000*	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	809.880.908.000	*788.341.122.000*	*-21.539.786.000*	*-2,66-*
b.	**Dana Taransfer Khusus :**	**232.980.247.000**	233.282.347.000	302.100.000	0,13
	1) DAK Fisik	1.124.124.000	*1.124.124.000*	-	-
	2) DAK Non Fisik	231.856.123.000	*232.158.223.000*	*302.100.000*	*0,13*
2)	**Dana Insentif Fiskal**	***21.500.426.000***	21.457.852.000	-42.574.000	-0,20
3)	**Dana Otonomi Khusus**	-	-	-	
4)	**Dana Keistimewaan**	-	-	-	-
5)	**Dana Desa**	***83.992.155.000***	83.992.155.000	-	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**89.604.093.744**	**132.537.466.606**	**42.933.372.862**	**47,91**
1)	Pendapatan Bagi Hasil	64.204.483.370	107.137.856.232	42.933.372.862	66,87
2)	Bantuan Keuangan	25.399.610.374	25.399.610.374	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.973.316.420**	**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**		**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**
1)	Hibah	-	-	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.973.316.420	12.456.625.376	10.483.308.956	531,25

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah dalam perubahan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.785.189.868.738,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.209.264.162,00, atau naik sebesar 3,91 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.717.980.604.576,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 491.362.674.756,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 35.072.842.344,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 456.289.832.412,00.

   Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

   a. Pajak Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 342.9359.241.433,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.548.948.301,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 324.810.293.132,00.
   b. Retribusi Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 129.943.268.695,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.687.436.495,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 8.255.832.200,00.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 13.843.338.532,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.418.342.927,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 10.424.995.605,00.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.216.826.096,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 107.581.885.379,00) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 112.798.711.475,00.

2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.281.370.568.606,00 meningkat sebesar Rp. 21.653.112.862,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.259.717.455.744,00.

a. Transfer Pemerintah Pusat dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.148.833.102.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.21.280.260.000) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.170.113.362.000,00. yang terdiri dari :

1). Dana Perimbangan, pada perubahan tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 1.043.383.095.000,00, mengalami penurunan sebesar (Rp.21.237.686.000,00) dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.064.620.781.000,00, dana perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp. 21.759.626.000,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU), dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 788.341.122.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 21.539.786.000,00) dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 809.880.908.000,00.

c) Dana Transfer Khusus, (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 233.282.347.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 302.100.000,00 dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 232.980.247.000,00.

2). Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 21.457.852.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 42.574.000,00) dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 21.500.426.000,00.

3). Dana Desa, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 83.992.155.000,00.

2.1. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dalam perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 107.137.856.232,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.933.372.862,00 dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 89.604.093.744,00. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

1). Pendapatan Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 107.137.856.232,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.900.372.862,00 atau naik 66,87% dari induk tahun 2025 sebesar Rp. 64.204.483.370,00.

2). Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 25.399.610.374,00 tetap sama dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 25.399.610.374,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 12.456.625.376,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.483.308.956,00 dibandingkan dengan induk tahun 2025 sebesar Rp. 1.973.316.420,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pendapatan pengembalian sisa belanja hibah pilkada.

.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman sosial, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public,* melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, dan minimal 10% dari APBD diluar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi dan kebencanaan. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efesiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan

melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverge (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2025.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2026, maka dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026.
8. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamanatkan tentang penggunaan belanja yang bersifat wajib antara lain:

a. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

   Berdasarkan alokasi Anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, prosentase belanja Pendidikan adalah sebesar 34,89% dari total belanja APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mendapatkan prioritas dan mendapatkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga dengan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

b. Sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

   Berdasarkan alokasi Anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, prosentase belanja pegawai adalah sebesar 41,35 %. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, gaji dan tunjangan KDH dan WKDH, dan gaji dan tunjangan DPRD, serta pembayaran belanja pegawai lainnya.

c. Sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Berdasarkan alokasi belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, prosentase belanja infrastruktur publik adalah sebesar 25,92 %. Rendahnya belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 adalah karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan porsi belanja lebih dominan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan.

d. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

   Berdasarkan alokasi anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, penggunaan 10% Opsen PKB dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perkim melalui sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 6.574.758.189,00 dan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp. 3.879.169.220,00 dengan besaran persentase 36 % dari total penerimaan Opsen PKB sebesar Rp. 29.367.801.585,00

e. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum. Kegiatan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

   Berdasarkan alokasi anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, penggunaan 10% PBJT Tenaga Listrik dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 8.604.747.424,00, melalui sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.020.500.000,00, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 1.664.200.700,00 dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 5.920.046.724,00 dengan

besaran persentase 34% dari total penerimaan pajak PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 25.380.000.000,00.

f. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan Kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

   Berdasarkan alokasi anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, penggunaan pajak rokok dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 25.985.056.164,38 dengan komposisi sebesar 87,50 % dari total penerimaan pajak rokok dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 3.712.150.880,63 dengan komposisi sebesar 12,50 % dari total penerimaan pajak rokok sebesar Rp. 29.697.207.045,01.

g. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah.

   Berdasarkan alokasi anggaran belanja yang tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, penggunaan PAT dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.080.000.000,00 dengan komposisi sebesar 87 % dari total penerimaan PAT atau sebesar Rp. 1.242.320.538,00.

9. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja unsur pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Sesuai dengan Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 besaran alokasi belanja unsur pengawasan adalah sebesar 0,21 % dari 0,75 % yang diamanatkan atau sebesar Rp. 4.047.242.658,00 dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.927.276.337.467,00.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara rinci disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	**BELANJA DAERAH**	**1.803.429.121.925**	**1.927.276.337.467**	**123.847.215.542**	**6,87**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.490.412.292.958**	**1.558.510.499.059**	**68.098.206.101**	**4,57**
5.1.01	Belanja Pegawai	953.252.694.320	942.141.326.815	(11.111.367.505)	(1,17)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.232.097.638	521.223.334.944	52.991.237.306	11,32
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	62.177.501.000	91.965.837.300	29.788.336.300	47,91
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000	3.180.000.000	(3.570.000.000)	(52,89)
5.2	**BELANJA MODAL**	**74.431.281.049**	**127.951.107.295**	**53.519.826.246**	**71,91**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	-	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**236.085.547.918**	**238.314.731.113**	**2.229.183.195**	**0,94**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	43.298.596.293	48.220.252.738	4.921.565.445	11,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192.786.951.625	190.094.478.375	(2.692.473.250)	(1,40)
	Surplus/(Defisit)	**(85.448.517.349)**	**(142.086.468.729)**	**(56.637.951.380)**	**66,28**

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.927.276.337.467,00, dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.803.429.121.925,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 123.847.215.542,00, atau mengalami kenaikan sebesar 6,87 %. Adapun rincian Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.558.510.499.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.098.206.101,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.490.412.292.958,00.

   Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:

   a. Belanja Pegawai, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 942.141.326.815,00, mengalami penurunan sebesar (Rp. 11.111.367.505,00) dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 953.252.694.320,00.
   b. Belanja Barang dan Jasa, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 521.223.334.944,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.991.237.306,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 468.232.097.638,00.
   c. Belanja Hibah, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 91.965.837.300,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.788.336.300,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 62.177.501.000,00.
   d. Belanja bantuan sosial dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.180.000.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.570.000.000,00) dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.750.000.000,00
2. Belanja Modal dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 127.951.107.295,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 53.519.826.246,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 74.431.281.049,00.
3. Belanja tidak terduga dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 tetap sama dengan induk tahun anggaran 2025.
4. Belanja Transfer dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 238.314.731.113,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.229.183.195,00 dari induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 236.085.547.918,00

   Belanja Transfer terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 48.220.252.738,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.921.565.445,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 43.298.596.293,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 190.094.478.375 mengalami penurunan sebesar (Rp. 2.692.473.250,00) dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 192.786.951.625,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPa bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikan digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA dalam perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 146.086.468.729,00 meningkat sebesar Rp. 56.637.951.380,00 dari rencana induk tahun 2025 sebesar Rp. 89.448.517.349,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2025 direncanakan sama dengan induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 diarahkan untuk penyertaan modal yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp. 3.000.000.000,00, dan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 146.086.468.729,00, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 142.086.468.729,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp. (142.086.468.729,00).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Karangasem. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Adapun langka-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB.
b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialiasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususunya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
e. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah

f. Memperkuat struktur permodalan BUMD, melalui perluasan sumber permodalan dan pembiayaan diantaranya pemupukan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
g. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
h. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian visi misi serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan belanja yang bersifat *mandatori spanding* sesuai ketentuan per Undang-Undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
   a. Hibah, untuk menyentuh organisasi/komunitas serta Hibah dan Bantuan kepada partai politik.
   b. Bantuan Sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu;
   c. Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga kepada subak dan subak abian sebagai bagian dari penguatan adat dan budaya;
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, maka strategi sumber pendanaan pembiayaan masih tetap pada SiLPA yaitu sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya, termasuk mendorong dilakukannya pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 adalah landasan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/botoom up*) melalui proses partisipasi masyarakat serta disusun dengan melihat situasi dan perkembangan terkini terkait dengan kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya Rancangan Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 ini dibahas dan disepakati ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa poin kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah pada Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.785.189.868.738,00, tetap sama/tidak ada perubahan.
2. Penyesuaian Rincian Obyek Pendapatan Pajak Daerah (Pajak BPHTB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB).
3. Belanja Daerah pada Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.927.276.337.467,00, tetap sama/tidak ada perubahan.
4. Eksekutif diperkenankan melakukan pengaturan belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah melalui penambahan dan rasionalisasi anggaran belanja daerah per SKPD, pergeseran antar perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis belanja, rincian belanja, sub rincian belanja dan uraian belanja daerah.